



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.1

G. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Seluruh	Mikro Kecil Me-nengah Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Daftar tenaga ahli yang kompeten di bidang Jasa Perantaraan Perdagangan Properti sebagai berikut: a. Seluruh Broker	3 Hari	1. Memiliki perjanjian tertulis dengan pengguna jasa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Menyampaikan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Menggunakan sistem pembayaran	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Properti wajib ber-kewarga-negaraan Indonesia dengan area pekerjaan perantara-an perdagangan properti (<i>property brokerage</i>) b. Paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dengan area pekerjaan manajemen perantara-an		yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi 4. Menunjukkan tanda pengenal dalam menjalankan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Mencantumkan nomor Perizinan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perdagangan properti (<i>management broker property</i>) c. Dalam hal melakukan aktivitas jasa manajemen pengelolaan Properti dan konsultansi investasi Properti, wajib didukung paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli		Berusaha P4 di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik media cetak, media elektronik, maupun media lainnya 6. Menentukan besaran/ nilai komisi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Menyampaikan laporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dengan area pekerjaan manajemen properti dan investasi (<i>property management and investment</i>) Setiap tenaga ahli dilengkapi dengan: a. Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang b. Surat pernyataan		8. kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 9. Menyampaikan perubahan data P4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri Perdagangan Dalam hal P4 melakukan aktivitas perdagangan melalui sistem				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyatakan bahwa tenaga ahli tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis c. Daftar Riwayat Hidup/ <i>Curriculum Vitae</i>		elektronik wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.			
2	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	1. Survei Lingkungan Hidup (<i>Ecological Survey</i>) 2. Survei Kualitas	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah	5 Hari	1. Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survei yang paling sedikit memuat	Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			(Quality Survey)				hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Daftar tenaga jasa survei (<i>Surveyor</i>) yang kompeten di bidang Jasa Survei sebagai berikut: a. Paling sedikit 5 (lima) orang <i>Surveyor</i> memiliki kewarganegaraan Indonesia di kantor pusat dan 1 (satu) orang di kantor cabang yang masing-		klausula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang jasa survei 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Menetapkan dan menerapkan standar, prosedur dan tata cara Jasa Survei				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masing dilengkapi dengan: • Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang • Surat pernyataan yang menyatakan bahwa <i>Surveyor</i> tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis		4. Menjaga kerahasiaan Laporan Survei 5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei (<i>Surveyor</i>) yang termuat dalam Laporan Survei dan/atau dokumen lainnya 6. Menggunakan fasilitas spengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
						.	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Riwayat Hidup/<i>Curriculum Vitae</i>b. Dalam hal diperlukan, dapat mempekerjakan warga negara asing sebagai penasihat teknis (<i>technical advisor</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		7. Mencantumkan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat Kompetensi/Pelatihan Tenaga Survei (<i>Surveyor</i>) di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									maupun media lainnya			
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi lingkungan kerja; Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Orang (APJP); pengujian merusak	Mikro Kecil Menengah Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi persyaratan penunjukan Pemeriksaan Laboratorium K3 meliputi lingkungan kerja; Alat pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP); Pengujian merusak (<i>Destructive Test</i>) dan Tidak merusak (<i>Non destructive Test</i>) secara radiasi maupun non radiasi atau obyek komponen peralatan lainnya	3 Hari	Memenuhi kewajiban Pemeriksaan Laboratorium K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (sebagai K/L Pendukung), yaitu: 1. Mempunyai laboratorium yang terakreditasi 17025 dari KAN dengan ruang lingkup Pengujian	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(destructive test) dan tidak merusak (non destructive test) secara radiasi maupun non radiasi atau obyek komponen peralatan lainnya yang berisiko tinggi untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 sebagai penunjang pemeriksaan dan				yang berisiko tinggi untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 Sebagai penunjang pemeriksaan dan pengujian obyek K3 yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (sebagai K/L Pendukung) dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Penunjukan sesuai Bidang yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan		2. Memiliki peralatan Pemeriksaan dan Pengujian laboratorium yang sudah terkalibrasi 3. Memiliki Laporan pelaksanaan kegiatan dan/ atau Berita acara pemeriksaan dokumen dari Kementerian Ketenagakerjaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengujian obyek K3									
			Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi persyaratan pendirian Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan diverifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai K/L Pendukung), yaitu Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium	5 Hari	Memenuhi kewajiban pendirian Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai K/L Pendukung), yaitu:	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		1. Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik 2. Menyampaikan Laporan Berkala			
3	71203	Jasa Inspeksi Periodik	1. Survei Komoditas Perdagangan 2. Survei Sarana Angkutan Darat,	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) 2. Daftar tenaga jasa survei (Surveyor) yang kompeten di	5 Hari	1. Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survey yang paling sedikit memuat	Uji Berkala Kendaraan Bermotor Swasta dan APM	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Laut dan Udara Berikut Per lengkapannya Survei Sarana Penyimpanan dan Pengangkutan Komoditas Perdagangan (Warehousing Supervision)				bidang Jasa Survei sebagai berikut: a. Paling sedikit 5 (lima) orang Surveyor memiliki kewarganegaraan Indonesia di kantor pusat dan 1 (orang) di kantor cabang yang masing-masing dilengkapi dengan: • Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau Sertifikat Pelatihan yang		klausula sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang jasa survei 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Menetapkan dan menerapkan standar,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			4. Survei Dengan Merusak Obyek (<i>Destruktive Testing</i>) dan/ atau Survei Tanpa Merusak Obyek (<i>Non Destruktive Testing</i>) dengan metode non-radioaktif				diterbitkan oleh instansi yang berwenang <ul style="list-style-type: none">• Surat pernyataan yang menyatakan bahwa <i>Surveyor</i> tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis• Riwayat Hidup/<i>Curriculum Vitae</i> b. Dalam hal diperlukan, dapat mempekerjakan warga negara asing sebagai		prosedur dan tata cara Jasa Survei <ul style="list-style-type: none">4. Menjaga kerahasiaan Laporan Survei5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei (<i>Surveyor</i>) yang termuat dalam Laporan Survei dan/atau dokumen lainnya				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			5. Survei Kuantitas (<i>Quantity Survey</i>) 6. Survei Pengawasan dari Proses Kegiatan Sesuai Standar (<i>Supervision Survey</i>) 7. Survei Pembiayaan atau Pengawasan				penasihat teknis (<i>technical advisor</i>) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		6. Menggunakan fasilitas pengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang. 7. Mencantumkan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat Kompetensi/ Pelatihan Tenaga Survei (<i>Surveyor</i>) di tempat yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			8. Persediaan Barang Survei untuk Kepentingan Asuransi 9. Survei Perdagangan dan/ atau Pengawasan Persediaan Barang 10. Survei Kesesuaian Standar						mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dalam Proses Produksi Komoditas Perdagangan									
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Obyek K3, meliputi pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat	Mikro Kecil Menengah Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi persyaratan penunjukan pemeriksaan dan pengujian obyek K3, meliputi Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun; Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; Pesawat Tenaga dan Produksi Listrik; Elevator dan Eskalator,	3 Hari	Memenuhi kewajiban Pemeriksaan dan Pengujian Obyek K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (sebagai K/L Pendukung), yaitu: 1. Memiliki peralatan pemeriksaan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			tenaga dan produksi, listrik, elevator dan eskalator, penyalur petir dan peralatan elektronik, instalasi proteksi kebakaran, konstruksi dan bangunan, lingkungan kerja dan bahan berbahaya, angkur, Alat Pelindung Diri (APD), Alat				Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik, Instalasi Proteksi Kebakaran; Konstruksi dan Bangunan; Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya; Angkur; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP), Pengujian Merusak (Destructive Test) dan tidak merusak (Non Destructive Test) secara radiasi maupun non radiasi untuk memastikan		dan pengujian yang sudah terkalibrasi 2. Memiliki laporan pelaksanaan kegiatan dan/atau Berita acara pemeriksaan dari Kementerian Ketenagakerjaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelindung Jatuh Perorangan (APJP), pengujian merusak (<i>destructive test</i>) dan tidak merusak (<i>non destructive test</i>) secara radiasi maupun non radiasi untuk memastikan obyek tersebut layak untuk dioperasikan/dimanfaatkan				obyek tersebut layak untuk dioperasikan/dimanfaatkan oleh pekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (sebagai K/L Pendukung) yaitu Surat Keputusan Penunjukan sesuai Bidang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kan oleh pekerja									
4	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Survei Sarana Keteknikan dan Industri Termasuk Rekayasa Teknik (<i>Technical and Industri Survey</i>)	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) 2. Daftar tenaga jasa survei (<i>Surveyor</i>) yang kompeten di bidang Jasa Survei sebagai berikut: 1. Paling sedikit 5 (lima) orang <i>Surveyor</i> memiliki kewarganegaraan Indonesia di kantor	5 Hari	1. Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survei yang paling sedikit memuat klausula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa survei 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pusat dan 1 (orang) di kantor cabang yang masing-masing dilengkapi dengan: • Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang • Surat pernyataan yang me-		Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Menetapkan dan menerapkan standar, prosedur dan tata cara Jasa Survei. 4. Menjaga kerahasiaan Laporan Survei 5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							<p>nyatakan bahwa Surveyor tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis dan</p> <ul style="list-style-type: none">• Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae <p>2. Dalam hal diperlukan, dapat mempekerjakan warga negara asing sebagai penasihat teknis (technical</p>		<p>(surveyor) yang termuat dalam laporan Survei dan/atau dokumen lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">6. Menggunakan fasilitas pengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang7. Mencantumkan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							advisor) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Kompetensi/ Pelatihan Tenaga Survei (Surveyor) di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.			
5	63122	Portal web dan/atau platform digital	1. Penyelenggara Perdagangan	Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan data dan/atau informasi	- Tanda Daftar Penyelegara	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dengan tujuan komersial	an Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelegara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan dalam wilayah hukum Negara						secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampaikan data / informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu-waktu dalam rangka pembinaan dan	Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) - Tanda Daftar Penyelegara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) - Distribusi - Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kesatu-an Republik Indone-sia 2. PPMSE dan Penye-lenggara Sarana Peranta-ra (PSP) yang tidak di-kecuali-kan yang berkedu dukan di luar wilayah hukum Negara Kesatu-an Republik						pengawasan dalam hal: a. Diperlu-kan data muta-khir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak ter-cakup dalam data dan /atau informasi yang disampai-kan kepada lembaga pemerintah yang menye-	- Sertifikat Pe-menuhan Standar Sistem Manaje-men Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredar-an		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Indone-sia yang melaku-kan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah hukum Negara Kesatu-an Republik Indone-sia						lenggar-a-kan urusan pemerin-tahan di bidang statistik 2. Memiliki Surat Tanda Terdaftar Penyeleng-gara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyeleng-garakan urusan pemerintah-an di bidang komunikasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. dan informatika Memiliki layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (<i>email</i>) 4. Menayangkan layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Kecil - Me-nengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE))	1. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik komunikasi	3 Hari	1. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							2. dan informatika 3. Alamat website dan/atau nama aplikasi 3. Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (<i>email</i>) 4. Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di			menyampaikan data/informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu-waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data mutakhir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak ter-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga 5. Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (<i>mirroring</i>) dengan sistem elektronik		cakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik 2. Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbasis aplikasi mobile		dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.32

Nc	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Memiliki atau menyedia-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen 6. Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.35

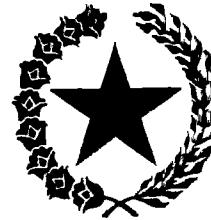
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen 8. Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs 10. Menyediakan pusat atau unit pengembangan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri			
6	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Seluruh	Mikro Kecil Me-nengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
7	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
8	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pen-daftaran Tipe Kendara-an Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota
9	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pen-daftaran Tipe Kendara-an Bermotor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
10	45202	Pencucian dan Salon Mobil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
11	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
12	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/Agen) - Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Me-nengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
15	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Seluruh	- Mikro - Kecil - Me-nengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Mikro Kecil Menengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Bakar dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
17	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Mikro Kecil Menengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen- daftaran Distri- butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri- butor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
18	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Mikro Kecil Menengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
19	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Seluruh, kecuali Penyalenggara Pasar Lelang Komoditas	Mikro Kecil Menengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan - Sertifikasi Nomor		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kontrol Veteriner		
20	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.49

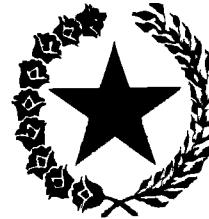
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemas-an		
21	46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/atau Bahan Penolong		
22	46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distri-butor/Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
24	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Perburuan		- Besar					Menteri Perdagangan	Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										Seluruh		Menteri/ Kepala Badan
25	46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
26	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate		
27	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan - Izin Keamanan PSAT/Health Certificate		
28	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan		
29	46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Olahan Lainnya		- Besar					Menyeri Perdagangan	Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Bakar dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Registrasi produk hewan - Sertifikasi nomor kontrol veteriner		
30	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangangan Olahan - Izin Edar Pangangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredara - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi produk hewan - Sertifikasi nomor kontrol veteriner		
31	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Pe-netapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan / atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi produk hewan - Sertifikasi nomor kontrol veteriner		
32	46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Pe-netapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten / Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										men Variasi Promosi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi produk hewan - Sertifikasi nomor kontrol veteriner		
33	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Kabupaten /Kota Seluruh	Kabupaten /Kota Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.77

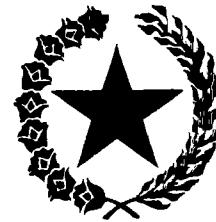
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
34	46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	Distributor Minuman Beralkohol	-Menengah-Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Distributor)	1. Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), kecuali PT Perorangan 2. Surat Penunjukkan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari Produsen dan/atau Importir	5 Hari	1. Menerapkan standar K3L 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan	- Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (SK IT-MB) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Terdaftar Minuman Beralkohol 3. Tanda Daftar Gudang untuk setiap Gudang yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menyimpan dan mendistribusikan minuman beralkohol 4. Rekomendasi Gubernur untuk setiap wilayah pemasaran, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian		wilayah pemasarannya 3. Penjualan Minuman beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran dan tempat lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 4. Penjualan Minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di	Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
						Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai alamat kantor pusat perusahaan untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C			supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB), dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah 5. Mengajukan perubahan SKMB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKMB 6. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap		Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredara - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									triwulan, mengenai: • Penunjukan Sub-Distributor, Pengecer, dan/atau Penjual Langsung • Pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol			
		Sub Distributor Minuman Beralkohol	- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB))	1. Badan Usaha berbentuk CV, Firma, Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT), kecuali PT Perorangan	5 Hari	1. Menerapkan standar K3L 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
						Sub Distributor)	2. Surat Penunjukan Sub-Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol Terdaftar 3. Tanda Daftar Gudang untuk setiap Gudang yang dikuasai 4. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai alamat kantor pusat		Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya 3. Penjualan Minuman beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran dan tempat2 lainnya yang ditentukan oleh				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.82

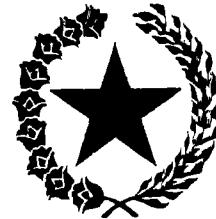
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C		4. Pemerintah Daerah Penjualan Minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di supermarket, hypermarket, TBB, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah 5. Mengajukan perubahan SKMB apabila terdapat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data atau informasi pada SKMB 6. Menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan setiap triwulan, mengenai: a. Penunjukan Pengacara, dan/ atau Penjual Langsung b. Pengadaan dan realisasi peredaran			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Minuman Beraalkohol			
35	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendataran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten / Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar Suplemen Kesehatan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										men Variasi Promosi Pangan Olahan - Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.87

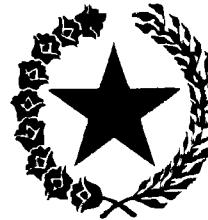
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehat-an - Persetujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehat-an - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Per-setujuan Iklan Suplemen Kesehat-an - Hasil Uji Praklinik		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan		
36	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor / Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.90

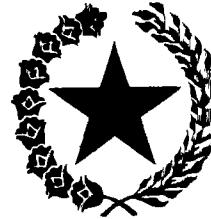
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										atau Bahan Penolong		
37	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Seluruh	Mikro Kecil Menengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta/ Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/ Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
41	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.94

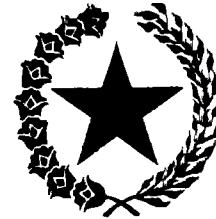
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Alas Kaki Lainnya		-Besar					Menteri Perdagangan	Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
42	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis	Seluruh	- Mikro, - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pendaftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
43	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam	Seluruh	- Besar - Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Minister of Trade	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										- Surat Tanda Pendataran Distributor atau Agen Barang	Province/District/Kota Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta	
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.96

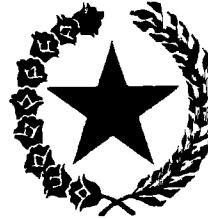
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Berbagai Bentuk								dan / atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
44	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendafataran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) Kabupaten / Kota Seluruh	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
45	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaf-taran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.98

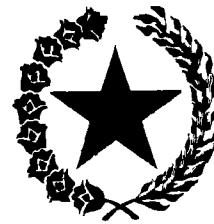
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
46	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.99

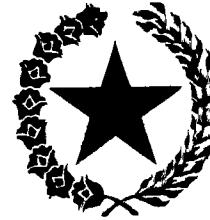
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
47	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Bahan Penolong			
48	46494	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta/ Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/ Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kontrol Veteriner		
49	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota
50	46499	Perdagangan Besar	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.102

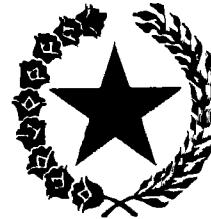
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Penduku-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ng Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor		
51	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.105

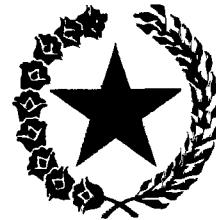
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
52	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.106

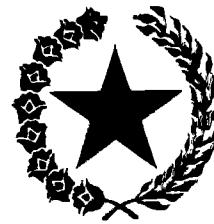
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetap- an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
53	46521	Perdagang- an Besar Suku Cadang Elektronik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen- daftaran Distribu- tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri- butor/ Agen) - Penetap- an Pusat	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
54	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video, CD dan DVD Kosong	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
55	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendataran Produk (TPP) Produksi Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), Dan Komputer Tablet - Surat Tanda Pendataran Distributor atau Agen Barang dan/ atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
56	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.110

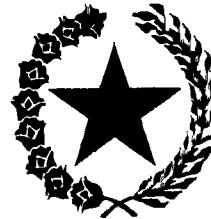
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
57	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/ atau Bahan Penolong		
58	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
59	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada P Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
60	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pendaf-taran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.113

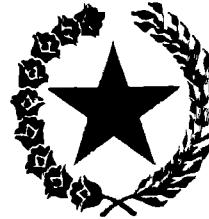
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
61	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Seluruh	-Besar					Menteri Perdagangan	Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen)	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
61	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendataran Distributor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan / atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
62	46632	Perdagangan Besar Kaca	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.115

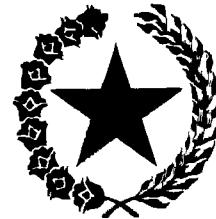
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
63	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
64	46637	Perdagangan Besar Cat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
65	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Usaha Pendistri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										busian Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Izin Usaha Perdagangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Pendaftaran pestisida		
66	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bentuk Dasar								atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
67	46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
68	46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
69	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa tak Terpakai (<i>Scrap</i>)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
70	46699	Perdagangan Besar	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Produk Lainnya YTDL		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
71	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Grosir/ Perkulakan dengan sistem	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



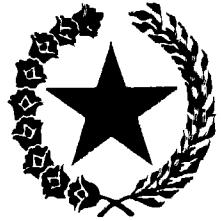
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.123

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pelayanan mandiri						undangan di bidang Toko Swalayan 2. Menerapkan standar K3L 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 4. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra	dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.124

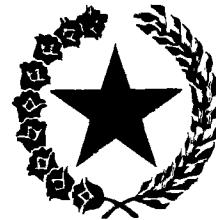
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki 5. Mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang. 6. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri	Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan - Pen-daftaran Pakan - Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggung-jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan	Perlengkapan Jalan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.127

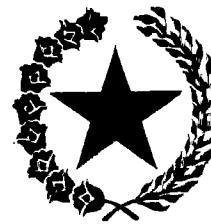
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan di-distribusikan			
		Grosir/ Perkulakan Tradisional	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat setiap tahun 3. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Bupati/ Walikota	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan			
72	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan,	Minimarket	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.129

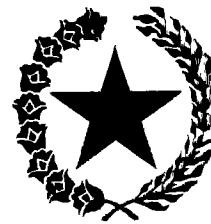
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Minuman Atau Tembakau di Minimarket /Super-market/ Hyper-market							2. Memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan. 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 4. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan	- Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Mengikuti sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.	Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik - Sertifikat Penerapan Penanganan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.131

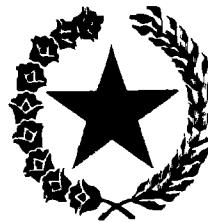
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri 8. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggung-jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Yang Baik Panggan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. kekayaan intelektual Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kecil (PSAT-PDUK) - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterine		
		Super-market	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta		
										Kabupaten / Kota	Bupati/ Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Mengikuti-sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang 6. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri 7. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggung-jawab terhadap			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual b. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Kecil dan Menengah 1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan 2. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
			Hyper-market									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Mengikuti- sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang 6. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggung-jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual b. Membina pengembang-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
73	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket /Super-	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Persetujuan Pelaksanaan Uji	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		market/ Hypermark et (Tradisional)								Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Kosmetik - Izin Edar Kosmetik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		
74	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan 2. Memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Persetujuan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									perundang- undangan di bidang Toko Swalayan 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 4. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai dengan	Pe-laksanaan Uji Klinik Kosmetik - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundangan 6. Mengikuti- sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang 7. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri 8. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual b. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			
75	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
76	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Peningangan Yang Baik Pangang Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
77	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



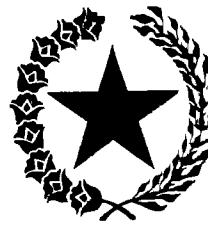
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
78	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner			
79	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
80	47216	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										- Registrasi Produk Hewan	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
81	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									- Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Registrasi Produk Hewan		
82	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A	-Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A))	1. Perizinan Berusaha sebagai Supermarket/ Hypermarket atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur	5 Hari	1. Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/ pramuniaga	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Standar	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Daerah Khusus Jakarta sebagai tempat penjualan eceran minuman beralkohol golongan A 2. Surat Penunjukan sebagai Pengecer Minuman Beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas		2. Melarang Konsumen meminum di lokasi penjualan 3. Menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain 4. Mengajukan perubahan SKP-A apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKP-A	Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kabupaten/ Kota tempat lokasi usaha					
			Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	-Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C (SKP-B&C))	1. Penetapan dari Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Jakarta sebagai tempat penjualan eceran minuman beralkohol golongan B dan/atau Golongan C 2. Surat Penunjukan sebagai Pengecer Minuman Beralkohol dari Distributor	5 Hari	1. Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/ pramuniaga 2. Melarang Konsumen meminum di lokasi penjualan 3. Menempatkan minuman beralkohol pada tempat		Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							atau Sub-distributor Minuman Beralkohol terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota tempat lokasi usaha 4. Bagi Pengecer yang mengajukan perpanjangan SKP-B&C, selain menyampaikan persyaratan di atas, juga menyampaikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena		4. Mengajukan perubahan SKP-B&C apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKP-B&C 5. Menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bea Cukai (NPPBKC)		Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/ Walikota setempat			
		Pengecer Minuman Beralkohol pada Toko Bebas Bea (TBB)	- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterangan Pengecer	1. Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), kecuali PT Perseorangan	5 Hari	1. Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21	Provinsi	Gubernur		
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
						Toko Bebas Bea (SKP-TBB)	2. Surat penunjukkan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai pengecer Minuman Beralkohol 3. Surat izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan 4. Bagi Pengecer Minuman Beralkohol pada TBB yang mengajukan perpanjangan SKP-TBB, selain menyampaikan persyaratan di atas, juga menyampaikan		(dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/pramuniaga 2. TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada: a. Orang yang bepergian keluar negeri atau b. Penumpang yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC)		sedang transit di kawasan pabean, dan wajib dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan 3. TBB sebagai pengecer yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menjual Minuman Beralkohol kepada: a. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik b. Pejabat/ tenaga ahli yang bekerja pada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya atau c. Turis asing yang akan keluar dari daerah pabean, dan wajib dibuktikan dengan Paspor dan/atau Kartu Identitas sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain 5. Mengajukan perubahan SKP-TBB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKP-TBB			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
83	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
84	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tembakau Di Toko								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
85	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Pengamanan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.166

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
86	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering,	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Serta Kue Basah, dan Sejenisnya		-Besar					Menteri Perdagangan	Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
87	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		
88	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
89	47245	Perdagangan Eceran Daging dan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ikan Olahan		-Besar					Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
90	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Penerapan Pe-nangan-an Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar . PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
91	47303	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
92	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
93	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.173

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
94	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
95	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.174

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
96	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
97	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video Di Toko	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
98	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
99	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.176

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
100	47513	Perdagangan Eceran Per lengkapian Jahit Menjahit	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
101	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.177

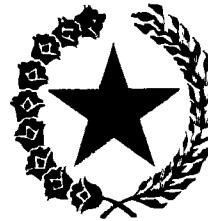
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
102	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
103	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.178

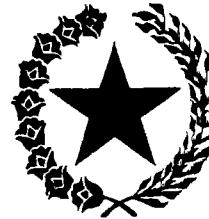
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Liat, Kapur, Semen atau Kaca									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
104	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
105	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.179

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
106	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
107	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis. dan Lak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.180

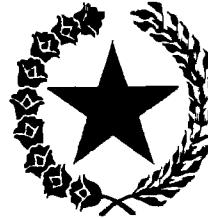
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
108	47528	Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
109	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
110	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
111	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
112	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
113	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.183

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dapur Dari Plastik									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
114	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
115	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.184

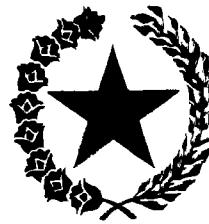
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
116	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
117	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.185

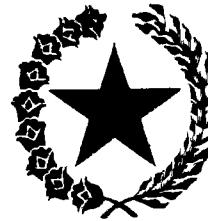
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
118	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Seluruh	-Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
119	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.186

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Gambar		-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
120	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
121	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.187

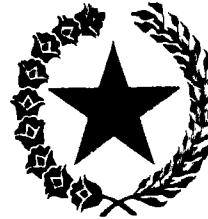
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
122	47630	Musik dan Video di Toko	Seluruh	- Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	dan/atau Bahan Penolong	
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
123	47640	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
				- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.188

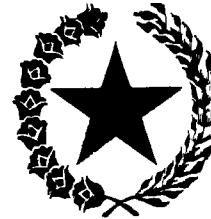
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko		- Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
124	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/ Karton	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
125	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.189

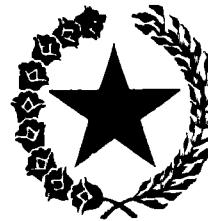
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
126	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	- Besar - Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
127	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.190

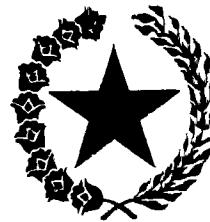
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
128	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
129	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.191

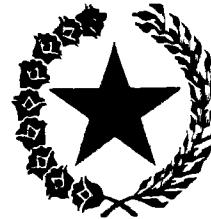
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
130	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
131	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.192

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
132	47734	Perdagangan Eceran Jam	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
133	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.193

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
134	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
135	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.194

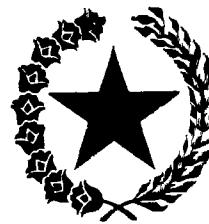
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
136	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
137	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.195

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
138	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
139	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.196

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
140	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
141	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.197

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
142	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
143	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.198

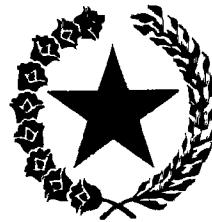
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
144	47751	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
145	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.199

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
146	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/Walikota Menteri/ Kepala Badan
147	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.200

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	* Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
148	47762	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
149	47763	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.201

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Pen-daftaran Pestisida - Pen-daftaran Pupuk An-Organik - Pen-daftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pem-benah Tanah	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
150	47764	Perdagangan Eceran Per-lengkapan dan Media Tanaman Hias	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.202

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
151	47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
152	47774	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.203

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
153	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
154	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading,	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.204

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bulu dan Binatang/ Hewan yang Diajukan								- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
155	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
156	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.205

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
157	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
158	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.206

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
159	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
160	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.207

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
161	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
162	47794	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Per-	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.208

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		lengkapannya		.							Seluruh	Menteri/Kepala Badan
163	47795	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
164	47796	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.209

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
165	47797	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
166	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.210

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									- Sertifikat Penerapan Peningangan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Seluruh		Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.211

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
167	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Peningangan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/Walikota Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
168	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Peningangan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/Walikota Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.213

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										(SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
169	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.214

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									- Sertifikat Penyamanan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	
170	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.215

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
171	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
172	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penangan-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.216

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
173	47822	Perdagangan Eceran	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	- Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.217

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
174	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.218

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sejenisnya								Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
175	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe,	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.219

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tauco dan Oncom									Seluruh	Menteri/Kepala Badan
176	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	Perdagangan minuman non-alkohol	Mikro Kecil Menengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
			Perdagangan minuman beralkohol	Tertutup untuk penanaman modal							Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.220

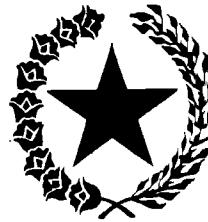
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
177	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
178	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penanganan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.221

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
179	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.222

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Tekstil		-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
180	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
181	47833	Perdagangan Eceran	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.223

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
182	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
183	47841	Perdagangan Eceran	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.224

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
184	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Pendaftaran Pestisida - Pendaftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.225

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pupuk An-Organik - Pen-daftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pem-benah Tanah		
185	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.226

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
186	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YBDI YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
187	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.227

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
188	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
189	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.228

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
190	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
191	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.229

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
192	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
193	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.230

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
194	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
195	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.231

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Plastik/ Melamin										
196	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
197	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.232

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
198	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
199	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.233

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Los Pasar Alat Kebersihan		-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
200	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
									Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
201	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.234

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas		-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
202	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
203	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.235

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan		- Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
204	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
205	47875	Perdagangan Eceran	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.236

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
206	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
207	47877	Perdagangan Eceran	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.237

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
208	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- Menulis, Alat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.238

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya										
209	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
210	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.239

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Mainan Anak-Anak								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
211	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
212	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.240

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
213	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
											Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
214	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
											Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.241

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
215	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
216	47896	Perdagangan Eceran	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.242

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
217	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
218	47899	Perdagangan Eceran	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.243

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
219	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi Sebagai Pemohon	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.244

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Laboratorium								Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.245

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<ul style="list-style-type: none">- Uji Klinik Kosmetik- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)- Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.246

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										(PSAT-PDUK)		
220	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
221	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.247

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Rumah Tangga dan Per-lengkapan Dapur									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
222	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. 47913	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pemenuhan Standar	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.248

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik		
223	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.249

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
224	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Seluruh	-Besar					Menteri Perdagangan	Baku dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										- Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
224	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Seluruh	Mikro Kecil Menengah Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.250

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.251

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
225	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
226	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta	
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.252

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
227	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia,	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.253

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
228	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
229	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.254

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Per-lengkapan Dapur									Seluruh	Menteri/Kepala Badan
230	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.255

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
231	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
232	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL	Selain Penjualan Langsung	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.G.256

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							(dua) orang atau lebih 2. Memenuhi Kriteria: a. Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung b. Memiliki program pemasaran (<i>marketing plan</i>) c. Memiliki kode etik d. Melakukan perekruitman penjual			benar kepada calon penjual langsung paling sedikit mengenai: a. Identitas perusahaan b. Mutu dan spesifikasi barang c. Kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan,	Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.257

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							langsung melalui sistem jaringan e. Melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung f. Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1		perbaikan dan pemeliharaannya d. Program pemasaran (<i>marketing plan</i>) e. Kode etik 2. Perusahaan yang telah melakukan perekuturan penjual langsung wajib: 1. Memberikan alat bantu penjualan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.258

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang WNI sebagai anggota dewan komisaris 3. Program pemasaran dan kode etik dibuat dalam Bahasa Indonesia		(starter kit) kepada setiap penjual langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang, program pemasaran (<i>marketing plan</i>) dan kode etik 2. Memastikan kegiatan yang di-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.259

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lakukan oleh penjual langsung sesuai dengan program pe- masaran (<i>marketing plan</i>) dan kode etik 3. Mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat paling sedikit nama			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.260

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Per-usahaan dan keterangan bahwa barang dijual dengan sistem penjualan langsung (<i>direct selling</i>) 4. Menetapkan harga barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.261

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk penjual langsung dan konsumen 5. Memberikan komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan yang dijanjikan 6. Memberikan tenggang waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak barang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.263

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diterima, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat peng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gunaan, pemakai-an, dan pe-manfaat-an barang yang diperdagangkan 8. Melaksana-kan pembina-an dan pelatihan untuk me-ningkat-kan ke-mampu-an dan penge-tahuan para			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.265

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab paling sedikit 1 (satu) sekali dalam 1 (satu) tahun 9. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.266

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penjual langsung untuk berprestasi dalam memasarkan barang 10. Memiliki daftar penjual langsung yang menjadi anggota jaringan pememasarannya yang dilengkapi dengan data			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.267

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									identitas penjual langsung dimaksud 11. Menjual barang yang telah memiliki izin edar atau telah menuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.268

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan 12. Memastikan penjual langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau <i>online market place</i> 3. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan usaha penjualan langsung			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.269

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan			
233	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Bagi Pemilik Gudang: Memiliki Tanda Daftar Gudang Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 2. Melakukan pengelolaan gudang	- Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Penetapan Distribusi Ikan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.270

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang	- Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.271

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang- undangan 4. Bagi yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan			
234	52102		Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Bagi Pemilik Gudang:	- Sertifikat Pemenuh-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.272

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Aktivitas Cold Storage		-Kecil -Menengah -Besar					Memiliki Tanda Daftar Gudang Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 2. Melakukan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang	an Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Pennerapan Distribusi Ikan - Sertifikat Pennerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical	Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Khusus Jakarta Bupati/Walikota Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.273

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. keluar dari gudang Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Bagi yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan	Control Point - Sertifikat Penerapan Pengamanan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.274

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan laporan pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
235	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Pergudangan Lainnya yang tidak termasuk KBLI 52101 s.d. 52108	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Bagi Pemilik Gudang: Memiliki Tanda Daftar Gudang Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Izin Usaha Per-gudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.275

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Melaksanakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang 3. Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang sesuai dengan	- Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.276

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Bagi yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan			
236	63990	Aktivitas Jasa	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.277

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Informasi Lainnya YTDL		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
237	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
238	73100	Periklanan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.G.278

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
239	73201	Penelitian Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
240	73202	Jajak Pendapat Masyarakat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.279

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
241	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
242	74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.280

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
243	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
244	77210	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.281

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Olahraga									Seluruh	Menteri/Kepala Badan
245	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
246	77292	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.282

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi									Seluruh	Menteri/Kepala Badan
247	77293	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
248	77294	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.283

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
249	77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
250	77299	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.284

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya Ytdl									Seluruh	Menteri/Kepala Badan
251	77311	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota
											Seluruh	Menteri/Kepala Badan
252	77312	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.285

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
253	77313	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
254	77319	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.286

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
255	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
256	77322	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.287

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
257	77323	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
258	77329	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.288

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
259	77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
260	77393	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.289

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
261	77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
262	77395	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.290

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
263	77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Pemeriksaan Nonmedik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.291

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
264	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
265	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.292

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
266	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
267	81300	Aktivitas Perawatan dan Pe-meliharaan Taman	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.293

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
268	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Adminis-trasi Kantor	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
269	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.294

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
270	95291	Aktivitas Vermak Pakaian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
271	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
272	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.295

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
273	96200	Aktivitas Penatu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
274	96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
275	46653	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bentuk usaha Perseorangan atau badan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan kepada Menteri	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.296

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			- Besar				usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum atau bukan badan hukum dengan menunjukan:		Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.297

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki API-U; 2. Bukti penguasa-an gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dengan me-lampirkan Berita		sejak usahanya dihentikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan penghentian kegiatan usaha 4. Mendistribusikan formalin dan Paraformal-dehyde wajib menambahkan bahan pemahit sesuai dengan rekomendasi teknis dari lembaga			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.298

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Acara Pemeriksaan Fisik gudang tempat penyimpanan B2 4. Surat pernyataan yang menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki		pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 5. Mendistribusikan bahan berbahaya dan wilayah pendistribusian sesuai dengan surat pengunjukannya (instansi yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.299

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengetahuan di bidang kimia yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi bidang kimia dari instansi yang berwenang 5. Rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah non-kementerian yang me-		bertanggung jawab) 6. Mencantumkan label pada kemasan dan menggunakan kemasan ukuran minimal sesuai peraturan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.300

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nyeleng-garakan urusan pe-merintahan di bidang pengawas-an obat dan makanan dalam hal DT-B2 mem-perdagang-kan B2 jenis Formalin dan Parafor-maldehyde					
276	46631	Perdagangan Besar	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.301

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Barang Logam untuk Bahan Konstruksi		- Kecil - Menengah - Besar					Distribusi Barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Pen- daftaran Distri- butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri- butor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe- nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
										Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
277	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata,	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan Distribusi Barang	- Surat Tanda Pen- daftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.302

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca		- Besar					kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Distri- butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe- nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
278	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur,	Usaha Perdagangan Besar semen seperti	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan Distribusi Barang kepada	- Surat Tanda Pen- daftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.303

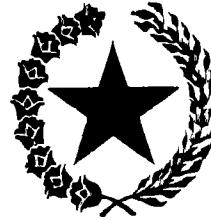
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasir, dan Batu	Portland putih, semen protland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan						Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
										Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	
279	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan Distribusi Barang kepada	- Surat Tanda Pendaftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.304

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
280	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan distribusi barang kepada	- Surat Tanda Pendafataran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.305

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Material Bangunan							Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
281	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan distribusi barang kepada	- Surat Tanda Pendaftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.306

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/ atau bukti transaksi	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.307

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan 3. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas			
282	46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.308

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Barang dan/ atau Jasa (STP Distri- butor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe- nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Pen- daftaran Pestisida - Pen- daftaran Pupuk An- Organik - Pen- daftaran Pupuk Organik,	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.309

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pupuk Hayati, Pemberah Tanah		
283	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah	- Surat Tanda Pen- daftaran Distri- butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri- butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.310

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	- Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan - Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate		
284	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.312

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB- PSAT)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.G.313

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.314

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
285	46311	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang	- Surat Tanda Pen- daftaran Distri- butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri- butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.315

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Pangan Yang Baik Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.316

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan - Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate		
286	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.317

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat benar, tetap dan jelas	Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.318

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.319

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
287	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.320

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pengelolaan Lingkungan Hidup		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.321

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pengolahan - menuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.322

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerapan Pengelolaan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.323

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemasan - Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.324

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
288	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar,	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komit-men	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.325

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								tetap, dan jelas	Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pemenuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.326

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
289	46322	Perdagangan Besar	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.327

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan		– Menengah – Besar					Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang	Pen-daftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.328

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benar, tetap, dan jelas	- Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Pe-rusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manaje-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.329

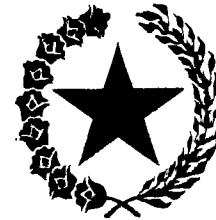
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										men Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
290	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan	- Surat Tanda Pendaftaran Distribu-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.330

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Olahan Telur							kan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	tor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.331

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pe-menuhan Standar Sistem Manage-men Ke-amaman		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.332

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
291	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor atau Agen	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.333

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.334

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.335

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sarana Peredaran - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
292	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.336

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.337

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.338

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pe-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.339

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										laksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Persetujuan Iklan Suplemen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.340

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehat-an - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.G.341

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<ul style="list-style-type: none">- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)- Izin Rumah Pengemasan- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner- Sertifikat Pendafataran Pakan Ikan		